

## **STRATEGI PENDEKATAN PARTICIPATORY RURAL APPRAISAL (PRA) DALAM MEWUJUDKAN KEMANDIRIAN MASYARAKAT TRANSMIGRASI DI KAMPUNG MARGA MULIA DISTRIK SEMANGGA**

<sup>1</sup>Hubertus Oja

<sup>2</sup>Hesty Tambajong

*Ilmu Administrasi Negara, Fisip – Unmus*

### **ABSTRACT**

Development policy for the currentis put emphasis on the concrete efforts so as to motivate the public to actively participate in the implementation of development towards independence of the civil society. This research have a purpose to know a strategic approach to participatory rural appraisal (PRA) to realize the independence of the transmigration community in Marga Mulia Village.

This research was held in the Marga Mulia Village, Semangga District. The researh used a qualitative method. Data collection techniques consists of literature review and field studies through a process of observation, interviews and documentation. Data analysis included data reductation, data presentation and conclusion.

The results showed that the participatory rural appraisal (PRA) approach in Marga Mulia Village, Semangga District don't yet optimal. The people is not yet fully involved in the development process of the village. The emphasis on participatory rural appraisal (PRA) approach requires active community involvement in the development stages of planning, implementatages of planning, implementation, monotoring and evaluation. The involvement of the society wasion, monotoring and evaluation. The involvement of the society was involved in the planning and implementation stages of involved in the planning and implementation stages of development. At the stages of monitoring and evaluation has been no direct socirect society involvement as the embodiment of social control to create a development climate for participatory ety involvement as the embodiment of social control to create a development climate for participatory development and democracy.

**Keywords:** Participatory Rural Appraisal (PRA); Transmigration community independence

## A. PENDAHULUAN

Model pembangunan yang selama ini dikembangkan di Indonesia masih bercorak *top-down approach*, sehingga menempatkan masyarakat sebagai obyek pembangunan. Pendekatan pembangunan yang demikian telah menempatkan masyarakat pada posisi marjinal, tidak berdaya dan pada akhirnya menjadi beban pemerintah sendiri ketika telah kehabisan sumber dayanya. Partisipasi masyarakat dalam pembangunan mutlak diperlukan, tanpa adanya partisipasi masyarakat pembangunan hanyalah menjadikan masyarakat sebagai objek semata. Salah satu kritik adalah masyarakat merasa “tidak memiliki” dan “acuh tak acuh” terhadap program pembangunan yang ada.

**Usman (2003)**, mengungkapkan bahwa pembangunan yang dilakukan oleh suatu negara pada saat ini tidak akan dapat lepas dari pengaruh globalisasi yang melanda dunia. Persolan politik, ekonomi dan sosial budaya masyarakat tidak dapat lagi hanya dipandang sebagai persoalan nasional. Masalah ekonomi atau politik, serta sosial budaya yang dihadapi oleh satu negara membawa imbas bagi negara lainnya dan permasalahan tersebut akan berkembang menjadi masalah internasional. Permasalahan yang muncul adalah “*kekhasan*” suatu masyarakat semakin lama semakin pudar seiring model pembangunan modernisasi yang tidak ubahnya sama dengan (*westernisasi*). Dunia akan menjadi sebuah kesatuan budaya yang lahir melalui gejala globalisasi. Permasalahan lainnya adalah bagaimana potensi lokal akan dapat berkembang atau mungkin sekedar bertahan di tengah gencarnya serangan globalisasi.

Penempatan masyarakat sebagai subjek pembangunan mutlak diperlukan sehingga masyarakat akan dapat berperan serta secara aktif mulai dari perencanaan, pelaksanaan hingga monitoring dan evaluasi pembangunan. Terlebih apabila kita akan melakukan pendekatan pembangunan dengan semangat lokalitas, maka masyarakat lokal menjadi bagian yang paling memahami keadaan daerahnya tentu akan mampu memberikan masukan yang sangat berharga. Masyarakat lokal dengan pengetahuan serta pengalamannya menjadi modal yang sangat besar dalam melaksanakan pembangunan. Masyarakat lokal-lah yang mengetahui apa permasalahan yang dihadapi serta juga potensi yang dimiliki oleh

daerahnya. Bahkan pula mereka akan mempunyai “pengetahuan lokal” untuk mengatasi masalah yang dihadapinya tersebut.

Perpektif pembangunan memandang pemberdayaan sebagai sebuah konsep yang sangat luas. Pearse dan Stiefel (**Prijono, 1996**), menjelaskan bahwa pemberdayaan partisipatif meliputi menghormati perbedaan, kearifan lokal, dekonsentrasi kekuatan dan peningkatan kemandirian. Partisipasi masyarakat berkaitan dengan proses pembelajaran guna meningkatkan kemampuan msayarakat itu sendiri. Untuk mewujudkan kemandirian masyarakat dalam pembangunan dilakukan dengan memberikan kewenangan secara proporsional kepada masyarakat untuk mengambil keputusan secara mandiri tentang program-program yang sesuai dengan kebutuhan dan prioritas permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat.

Kampung Marga Mulia, Distrik Semangga merupakan salah satu kampung yang menjadi basis transmigrasi yang ada di Kabupaten Merauke. Maksud dan tujuan dasar dari transmigrasi yakni adanya penyebaran dan pemerataan penduduk bagi semua daerah dalam menekan laju pertumbuhan. Di samping itu transmigrasi juga diharapkan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan taraf kesejahteraan masyarakat. Tidak semua masyarakat transmigrasi mengalami nasib yang sama, tentu ada yang bernasib baik dengan dibuka ruang transmigrasi, namun ada yang bernasib buruk bahkan tidak berdaya. Ketidakberdayaan (Nasib buruk), masyarakat transmigrasi akan menimbulkan kesenjangan ekonomi, sosial dan bahkan kesenjangan budaya.

Dampak yang dirasakan dari kesenjangan itu yang memicu munculnya persoalan di kalang masyarakat transmigrasi. Untuk mengatasi kesenjangan sosial ekonomi bagi masyarakat transmigrasi, maka perlu dilakukan strategi pemberdayaan untuk mengangkat derajat masyarakat yang kurang berdaya (lemah) menjadi masyarakat yang berdaya tinggi (kuat). Strategi pendekatan pemberdayaan masyarakat transmigrasi yang berpartisipasi dalam mengsejarkan taraf kesejahteraan masyarakat transmigrasi menjadi masyarakat yang mandiri. Sebagai konsep dasar pembangunan partisipatif adalah melakukan upaya pembangunan atas dasar pemenuhan kebutuhan masyarakat itu sendiri sehingga

masyarakat mampu untuk berkembang dan mengatasi permasalahannya sendiri secara mandiri, berkesinambungan dan berkelanjutan.

Partisipasi masyarakat menjadi hal yang sangat penting dalam mencapai keberhasilan dan keberlanjutan program pembangunan. Partisipasi berarti keikutsertaan seseorang ataupun sekelompok masyarakat dalam suatu kegiatan secara sadar. Hal ini senada dengan pendapat dari (Ndraha, 1990), mengartikan partisipasi sebagai pengambilan bagian dalam kegiatan bersama. Konsep ini memberikan makna bahwa masyarakat akan berpartisipasi secara sukarela apabila mereka dilibatkan sejak awal dalam proses pembangunan melalui program pemberdayaan. Ketika mereka mendapatkan manfaat dan merasa memiliki terhadap program pemberdayaan, maka dapat dicapai suatu keberlanjutan dari program pemberdayaan.

Partisipasi masyarakat dalam proses pemberdayaan merupakan salah satu kunci kesejahteraan sosial. Keterlibatan masyarakat baik secara fisik, pemikiran, material maupun finansial diharapkan akan meningkatkan rasa kebersamaan. Keikutsertaan masyarakat adalah sangat penting di dalam keseluruhan proses pembangunan. Partisipasi masyarakat dalam program pemberdayaan selayaknya mencakup keseluruhan proses mulai dari awal sampai tahap akhir. Oleh karena itu, partisipasi publik dapat terjadi pada 4 (empat) jenjang, yaitu: *a.* Partisipasi dalam proses pembentukan keputusan; *b.* Partisipasi dalam pelaksanaan; *c.* Partisipasi dalam pemanfaatan hasil; *d.* Partisipasi dalam evaluasi.

Model *Participatory Rural Appraisal* (PRA) merupakan suatu pendekatan dalam pemberdayaan dan peningkatan partisipasi masyarakat, yang penekanannya pada keterlibatan masyarakat dalam setiap proses pembangunan, artinya sebuah paradigma pembangunan yang menempatkan masyarakat sebagai pusat (*people centry development*). (Midgley, 1986), menyatakan bahwa partisipasi bukan hanya sekedar salah satu tujuan dari pembangunan sosial tetapi merupakan bagian yang integral dalam proses pembangunan sosial. Tuntutan akan partisipasi masyarakat semakin menggejala seiring kesadaran akan hak dan kewajiban warga negara.

Dalam pembangunan masyarakat pendekatan *participatory rural appraisal* (PRA) menghendaki pentingnya partisipasi masyarakat, karena masyarakat bukan hanya sebagai obyek tetapi juga harus mampu berperan sebagai subyek yang memberikan kontribusi positif bagi pembangunan bangsa. Kebijakan dalam pelaksanaan pembangunan sekarang ini dititik beratkan pada upaya-upaya konkrit dan pendekatan yang tepat, sehingga mampu memotivasi masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam pelaksanaan pembangunan menuju kemandirian masyarakat yang madani.

Metode *Participatory Rural Appraisal* (PRA) adalah suatu metode pendekatan untuk mempelajari kondisi dan kehidupan pedesaan dari, dengan, dan oleh masyarakat desa atau dengan kata lain dapat disebut sebagai kelompok metode pendekatan yang memungkinkan masyarakat desa untuk saling berbagi, meningkatkan, dan menganalisis pengetahuan mereka tentang kondisi dan kehidupan desa, membuat rencana dan bertindak, (Chambers, 1996).

Metode *Participatory Rural Appraisal* (PRA) bertujuan menjadi warga masyarakat sebagai pemeran utama dalam pembangunan baik awal perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan juga pengevaluasian program pembangunan dan bukan hanya sekedar objek pembangunan. Pembangunan partisipatif melalui *Participatory Rural Appraisal* (PRA) merupakan pendekatan pembangunan yang sesuai dengan hakikat otonomi daerah yang meletakkan landasan pembangunan yang tumbuh berkembang dari masyarakat, diselenggarakan secara sadar dan mandiri oleh masyarakat dan hasilnya dinikmati oleh seluruh masyarakat, (Sumaryadi, 2005). Melalui program-program pembangunan partisipatif tersebut diharapkan semua elemen masyarakat dapat secara bersama-sama berpartisipasi dengan cara mencurahkan pemikiran dan sumber daya yang dimiliki guna memenuhi kebutuhannya sendiri.

Strategi pemberdayaan *participatory rural appraisal* (PRA) dapat dilakukan melalui pendekatan secara individu maupun kelompok, untuk membangun dan meningkatkan potensi masyarakat agar mereka mampu menanggulangi berbagai persoalan yang dihadapinya dengan baik dan benar. Pemberdayaan masyarakat dapat ditumbuhkan melalui penyuluhan/proses pembelajaran untuk merubah perilaku, sikap yang subsisten tradisional menjadi berwawasan modern, yang

mempunyai kemampuan dalam mengambil keputusan tertentu sendiri, dapat memberikan respon yang tepat terhadap berbagai perubahan dan tantangan sehingga mampu mengendalikan usahanya dan mendorong untuk lebih mandiri. Melalui program-program pembangunan partisipatif tersebut diharapkan semua elemen masyarakat dapat secara bersama-sama berpartisipasi dengan cara mencurahkan pemikiran dan sumber daya yang dimiliki guna memenuhi kebutuhannya sendiri.

Menurut (Kartasasmita, 1997), menjelaskan bahwa kegagalan dalam mencapai hasil dari program pembangunan tidak mencapai sasaran karena kurangnya partisipasi masyarakat. Keadaan ini dapat terjadi karena beberapa sebab antara lain: 1. Pembangunan hanya menguntungkan segolongan kecil masyarakat dan tidak menguntungkan rakyat banyak; 2. Pembangunan meskipun dimaksudkan menguntungkan rakyat banyak, tetapi rakyat kurang memahami maksud dari pembangunan tersebut; 3. Pembangunan dimaksudkan untuk menguntungkan rakyat dan rakyat memahaminya, tetapi cara pelaksanaannya tidak sesuai dengan pemahaman mereka; 4. Pembangunan dipahami akan menguntungkan rakyat tetapi sejak semula rakyat tidak diikutsertakan.

## **B. BAHAN DAN METODE**

### ***1. Lokasi dan Rancangan Penelitian***

Penelitian ini dilakukan di Kampung Marga Mulia, Distrik Semangga. Kabupaten Merauke. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian yakni pendekatan kualitatif, dengan tipe analisis data yakni deskriptif kualitatif. Menurut (Sugiyono, 2013), penelitian kualitatif adalah penelitian yang dimaksudkan untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subyek penelitian, misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dll secara holistik (utuh) tentang hal-hal yang dikaji dalam penelitian ini.

### ***2. Informan Penelitian***

Informan dalam penelitian ini semua pihak yang berpengaruh langsung dalam aktivitas pembangunan kampung melalui strategi *participatory rural appraisal* (PRA). Sebagai informan dalam penelitian ini adalah: Kepala kampung Marga Mulia, Sekretaris Kampung, Kaur Pemerintahan Kampung, RT, Ketua

Kabogtan Kampung Marga Mulia, dan perwakilan dari masyarakat kampung Marga Mulia.

### **3. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah pengamatan awal, wawancara dan analisis dokumen yang berkaitan dengan indikator yang diukur yakni perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pengevaluasian.

### **4. Analisis Data**

Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan model Miles dan Huberman dalam (Sugiyono, 2013), yang mengemukakan bahwa aktifitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Ada tiga aktifitas dalam analisis data antara lain reduksi data, penyajian data, dan menarik kesimpulan/verifikasi.

## **C. HASIL PENELITIAN**

Model *participatory rural appraisal* (PRA) dimaksudkan untuk membuka ruang dan kesempatan kepada masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam setiap proses pemberdayaan dan pembangunan, sehingga masyarakat tidak lagi dipandang sebagai objek dari sebuah pembangunan tetapi masyarakat juga sebagai subjek (pelaku) dari proses sebuah pembangunan itu sendiri. *Participatory rural appraisal* (PRA) diharapkan adanya peran serta masyarakat dalam setiap program pemberdayaan masyarakat baik perencanaan, pelaksanaan, pengevaluasian, serta hasil yang diharapkan dapat sepenuhnya dinikmati oleh semua lapisan masyarakat. Pada penelitian ini bertujuan untuk mengetahui strategi pendekatan *participatory rural appraisal* (PRA) dalam mewujudkan kemandirian masyarakat transmigrasi di Kampung Marga Mulia. dengan menggunakan lima indikator pengukuran.

### **a. Perencanaan**

Pemahaman akan perencanaan merupakan proses awal dari manajemen. Tahap perencanaan merupakan tahapan yang sangat penting karena merupakan titik awal dari suatu tindakan atau kegiatan sebelum kegiatan itu dilaksanakan. Hakekat dari sebuah perencanaan adalah agar suatu kegiatan dapat dilaksanakan

secara baik guna menacapai suatu tujuan yang diinginkan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa pihak tentang proses perencanaan pembangunan di Kampung Marga Mulia menunjukkan bahwa perencanaan pembangunan kampung berawal dari musawarah masyarakat masing-masing dari tingkat RT dan selanjutnya akan dibahaas ditingkat kampung, namun ada sebagian masyarakat yang tidak terlibat langsung dalam perencanaan dan ketidakmampuan masyarakat dan RT dalam mengidentifikasi masalah-masalah yang terjadi di RT akan menjadi kendala sendiri dalam perencanaan pembangunan untuk dijadikan skala prioritas pembangunan yang berdasarkan tingkat kebutuhan masyarakat.

#### **b. Pelaksanaan**

Tahap pelaksanaan merupakan tahap yang sangat menentukan keberhasilan dari sebuah perencanaan. Suatu perencanaan tidak membawa dampak yang signifikan jika yang direncanakan tidak dilaksanakan, sehingga pelaksanaan merupakan tindakan nyata dari apa yang direncanakan. Dalam istilah kebijakan tahapan pelaksanaan atau implementasian merupakan tindakan dari intervensi pemerintah atas sebuah kebijakan, suatu perencanaan mempunyai dampak yang luas jika perencanaan tersebut dapat diimplementasikan.

Berdasarkan Hasil wawancara dengan pihaak-pihak yang menjadi informan dalam penelitian ini menunjukkan bahwa proses pelaksanaan kegiatan pembangunan kampung dilaksanakan oleh masyarakat sendiri dengan sistem Ongkos Harian Kerja (OHK), dan bekerja sama dengan pokja yang ada dikampung, namun disisi lain keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan belum seluruhnya mendapatkan tempat yang sama dan sacara proposional dalam kegiatan pelaksanaan karena masyarakat tidak semuanya ikut ambil bagian dalam pelaksanaan pembangunan kampung, disisi lain juga jika pekerjaan yang tidak bisa dikerjakan oleh masyarakat akan dilimpahkan pihak lain untuk mengerjakannya. Hal ini menunjukkan bahwa proses pelaksanaan pembangunan kampung belum sepenuhnya melibatkan masyarakat secara totalitas karena ada sebagian masyarakat yang tidak ikut serta dalam pelaksanaan pembangunan kampung.



### **c. Pengawasan**

Suatu kegiatan itu bisa berjalan dengan baik demi mencapai tujuan yang inginkan sebelumnya, maka menjadi hal penting suatu kegiatan tersebut sejatinya perlu untuk mendapatkan pengawasan secara langsung oleh berbagai macam pihak bukan saja pemerintah sebagai penyelenggara namun juga peran seta masyarakat dalam melakukan proses pengawasan.

Hasil wawancara di atas menunjukkan bahwa pengawasan dari setiap pelaksanaan pembangunan diawasi oleh bidang-bidang kerja pemerintahan yang ada di pemerintahan Kampung Marga Mulia dengan bekerja sama dengan bamuskan dan juga tim pokja yang di Kampung Marga Mulia, serta pengawas dari distrik sedangkan dari kalangan masyarakat hanya di wakili oleh bamuskam, artinya masyarakat tidak dilibatkan secara langsung dalam proses pengawasan hanya diwakili oleh bamuskam dan para RT/RW.

### **d. Pengevaluasian**

proses evaluasi kerja selalu dilakukan untuk melihat tingkat kemajuan dari setiap pembangunan kampung, manfaat yang dirasakan dan kendala-kendala yang terjadi dari setiap tahapan pembangunan. Berdasarkan pada hasil wawancara dengan informan sebagai sumber informasi penelitian tentang sistem penevaluasian terhadap program pembangunan di Kampung Marga Mulai, menunjukkan bahwa aspek pengevaluasian kerja ada dilakukan walaupun tidak dilakukan secara rutinitas. Proses evaluasi dilakukan oleh pemerintahan kampung sendiri baik dari tingkat RT/RW, aparatur kampung lainnya dan bekerja sama dengan tim pendamping distrik, untuk kalangan masyarakat mewakili bamuskam dan juga para RT yang mewakili, sedangkan untuk masyarakat sendiri kurang dilibatkan secara langsung dalam tahapan pengevaluasian, sehingga masyarakat sendiri ada yang tidak tau tentang mekanisme pembangunan yang ada di kampung serta tingkat keberhasilan yang dicapai dari suatu program pembangunan yang sudah dilakukan.

#### D. PEMBAHASAN

*Participatory Rural Appraisal* (PRA) merupakan suatu pendekatan dalam pemberdayaan dan peningkatan partisipasi masyarakat, yang penekanannya pada keterlibatan masyarakat dalam setiap proses pembangunan, artinya sebuah paradigma pembangunan yang menempatkan masyarakat/rakyat sebagai pusat (*people centry development*). Pada bagian ini akan membahas hasil penelitian yang berdasarkan dari hasil wawancara dengan informan terkait strategi pendekatan *participatory rural appraisal* (PRA) dalam mewujudkan kemandirian masyarakat transmigrasi di Kampung Marga Mulia, dengan menggunakan berbagai indikator pengukuran yakni:

##### 1. Perencanaan

Pendekatan perencanaan pembangunan di Kampung Marga mulia bersifat bottom up dengan model prencanaan yang partisipatif artinya masyarakat selalu dilibatkan dalam tahapan perencanaan melelalui rapat tingkat RT guna melihat kebutuhan masing-masing RT sebelum ke tingkat kampung agar bisa dijadikan skala prioritas pembangunan yang berdasarkan basis kebutuhan masyarakat di Kampung Marga Mulia, walaupun masih ada sebagian masyarakat ada yang tidak ikut secara langsung dalam perencanaan pembangunan kampung hanya diwakili karena kegiatan dilakukan pada malam hari.

Pada prinsipnya strategi perencanaan pembangunan di Kampung Marga Mulia sudah menerapkan model perencanaan partisipatif dan demokrasi dimana masyarakat selalu di buka ruang untuk menyampaikan ide, saran ataupun kritikan dalam setiap tahapan pembangunan. Dengan adanya partisipasi masyarakat dalam perencanaan dapat memberdayakan masyarakat dalam pengembangan diri khususnya kemampuan dalam menyampaikan pendapat dan menganalisi situasi lingkungan sosial-ekonomi dan bidang kehidupan laiannya yang terjadi guna mendapatkan penyelesaian.

Hal ini senada dengan pendapat dari Rosidi dan (Fajriani, 2013), bahwa semua warga masyarakat mempunyai suara dalam pengambilan keputusan, baik secara langsung maupun melalui lembaga-lembaga perwakilan yang sah yang mewakili kepentingan mereka. Lebih jauh ditegaskan lagi bahwa pertisipasi

menyeluruh dibangun berdasarkan kebebasan berkumpul dan mengungkapkan pendapat, serta kapasitas untuk berpartisipasi secara konstruktif, sehingga prinsip partisipasi mendorong warga untuk mempergunakan hak dalam menyampaikan pendapat dalam proses pengambilan keputusan yang menyangkut kepentingan masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung. Menurut Ericson (Slamet, 1994), bentuk partisipasi masyarakat dalam tahap perencanaan (*idea planing stage*). adalah pelibatan seseorang pada tahap penyusunan rencana dan strategi dalam penyusunan kepanitian dan anggaran pada suatu kegiatan/proyek. Masyarakat berpartisipasi dengan memberikan usulan, saran dan kritik melalui pertemuan-pertemuan yang diadakan.

Hakekat dari perencanaan partisipatif juga merupakan salah satu metode yang efektif untuk keterlibatan masyarakat menyiapkan agenda pembangunan yang diawali dengan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pengawasan secara partisipatif dalam upaya penyelesaian masalah-masalah di masyarakat yang dilakukan secara bersama-sama. Hal ini senada dengan pendapat dari (Abe, 2002), mengemukakan pengertian perencanaan partisipatif sebagai berikut: *“perencanaan partisipatif adalah perencanaan yang dalam tujuannya melibatkan kepentingan masyarakat, dan dalam prosesnya melibatkan rakyat (baik secara langsung maupun tidak langsung) tujuan dan cara harus dipandang sebagai satu kesatuan. Suatu tujuan untuk kepentingan rakyat dan bila dirumuskan tanpa melibatkan masyarakat, maka akan sangat sulit dipastikan bahwa rumusan akan berpihak pada rakyat”*.

## 2. Pelaksanaan

Pelaksanaan atau implemntasi dalam istilah kebijakan merupakan tindakan dari sebuah intervensi pemerintah dalam mewujudkan apa yang sudah direncanakan sebelumnya. Hasil penelitian tentang pelaksanaan pembangunan di Kampung Marga Mulia menunjukan bahwa strategi pelaksanaan kegiatan pembangunan kampung dilaksanakan oleh masyarakat sendiri dengan sistem Ongkos Harian Kerja (OHK) dan bekerja sama dengan pokja serta pemerintahan kampung dan didampingi oleh pendamping dari distrik. Hal ini menunjukan bahwa proses pelaksanaan pembangunan kampung yang dihasilkan dari buah perencanaan secara partsispatif selalu melibatkan masyarakat dalam kegiatan

pelaksanaan tersebut dengan memberikan upah harian sebagai bentuk sportifitas kepada masyarakat dalam bekerja.

Mekipun dalam pelaksanaan selalu melibatkan masyarakat, namun pada lain pihak tidak semua anggota masyarakat dilibatkan secara utuh dalam kegiatan pelaksanaan, hal ini bisa menimbulkan konflik sosial dalam masyarakat. Untuk itu menjadi penting bahwa hampir semua program pemerintah mensyaratkan pemberdayaan dan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaannya perlu dilibatkan secara utuh dan proporsional, dimana masyarakat ditempatkan pada posisi strategis yang menentukan keberhasilan program pembangunan. Hal ini senada dengan pendapat dari Handoko (**Rosidi dkk, 2013**), bahwa partisipasi merupakan tindakan ikut serta masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan kegiatan di dalam organisasi.

Penerapan model pelaksanaan dengan melibatkan masyarakat secara langsung memberikan peluang yang sama kepada masyarakat karena masyarakat bukan lagi dipandang sebagai objek dari sebuah pembangunan namun masyarakat juga sebagai subjek dalam pelaksanaan pembangunan. Dalam konteks pembangunan yang demokrasi selalu penekanannya pada keterlibatan masyarakat dalam setiap proses pembangunan, artinya sebuah paradigma pembangunan yang menempatkan masyarakat/rakyat sebagai pusat pembangunan (*people centry development*) bukan menjadikan masyarakat hanya sebagai penikamti akhir dari hasil sebuah pembangunan.

### **3. Pengawasan**

Keterlibatan dan pemberdayaan masyarakat dalam proses penyelenggaraan pemerintahan, khususnya pengawasan jalannya pemerintahan dalam berbagai aspek perlu memperoleh media yang memadai dalam mewujudkan penyelenggaraan negara yang jujur, bersih, transparan, bebas korupsi, kolusi dan nepotisme dapat relatif lebih mudah tercapai. Pengawasan adalah suatu kegiatan untuk memperoleh kepastian apakah pelaksanaan pekerjaan/kegiatan telah dilakukan dengan rencana semula. Kegiatan pengawasan pada dasarnya membandingkan kondisi yang ada dengan yang seharusnya terjadi, dengan demikian, pengawasan akan memberikan nilai tambah bagi peningkatan kinerja organisasi.

Hasil analisis data penelitian tentang pengawasan pembangunan yang ada di Kampung Marga Mulia menunjukkan bahwa proses pengawasan pembangunan hanya diawasi oleh perangkat kampung berdasarkan tupoksi kerja aparatur kampung tanpa ada masyarakat yang mengawasi artinya masyarakat tidak dilibatkan secara langsung dalam proses pengawasan hanya diwakili oleh bamuskam dan para RT/RW dan hasil pengawasan tersebut belum seutuhnya disampaikan kepada masyarakat sebagai bentuk pertanggungjawaban sosial dan sekaligus memberikan informasi kepada masyarakat tentang keberhasilan dari sesuatu yang dilaksanakan.

Proses pengawasan secara langsung oleh masyarakat belum terbangun di kalangan masyarakat Marga Mulia secara orang-perorangan namun diwakili oleh kelompok tertentu yang dalam hal ini aparatur kampung dan bamuskam kampung sebagai penjabaran sosial kontrol terhadap penyelenggaraan pembangunan dan belum ada mekanisme khusus yang mengatur pola pengawasan sehingga bisa memberikan informasi kepada masyarakat sebagai pemegang kedaulatan atas penyelenggaraan pembangunan dan pelayanan paublik.

Hal senada seperti yang tuangkan dalam Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia (LAN RI, 2003), menyatakan bahwa pengawasan masyarakat adalah bentuk social control yang telah memberikan amanahnya kepada pemerintah untuk mengelola sumber daya negara. Pernyataan ini senada dengan pendapat dari Hongren (Suadi, 1995), Pengawasan sebagai fungsi terakhir dari manajemen yang merupakan proses tindakan dan evaluasi terhadap implementasi sebuah perencanaan dan penggunaan umpan balik agar sasaran dicapai sesuai dengan target.

Pengawasan masyarakat ini bukan merupakan suatu aktivitas tanpa dasar. Peraturan perundangan menjamin bahwa masyarakat mempunyai hak untuk melakukan pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan, baik dilakukan secara perorangan maupun secara berkelompok. Adapun payung hukum yang melandasinya adalah Pasal 18 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, yang menyatakan sebagai berikut: ayat (1), "*Masyarakat secara perorangan maupun kelompok dan atau organisasi masyarakat dapat*

*melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*". Ayat (2), Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara langsung atau tidak langsung baik lisan maupun tertulis berupa permintaan keterangan, pemberian informasi, saran dan pendapat kepada Pemerintah, Pemerintah Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan lembaga lainnya sesuai dengan tata cara yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

Mengacu pada perundangan-undangan memberikan aturan normatif bagi pengawasan dari masyarakat sebagai bentuk kontrol sosial dalam penyelenggaraan pembangunan dan pelayanan publik. Hal penting dari pengawasan sebagai akomodasi hak asasi masyarakat dalam partisipasi masyarakat dalam pembangunan dan penyelenggaraan negara yakni hak untuk mengawasi, hak atas informasi, hak untuk berpendapat dan melakukan pengaduan serta hak perlindungan saksi.

#### **4. Pengevaluasian**

Dalam penyelenggaraan suatu organisasi, evaluasi dapat diartikan sebagai proses pengukuran akan efektivitas program dalam upaya mencapai tujuan organisasi yang telah direncanakan sebelumnya. Secara umum evaluasi merupakan suatu proses untuk mengetahui sejauh mana kegiatan tersebut telah tercapai. Proses pengevaluasian digunakan untuk mengukur suatu pekerjaan atau hal-hal yang kita lakukan, evaluasi sangat berguna atau bermanfaat agar dapat mengetahui tingkat pekerjaan dan juga sebagai penilaian terhadap apa yang dikerjakan. Hal ini sesuai dengan pendapat dari (Mustopadidjaja, 2003), evaluasi kinerja merupakan aktivitas dalam manajemen proses kebijakan yang dilakukan pada tahap pemantauan pelaksanaan, pengawasan, ataupun pertanggungjawaban. Setiap tahapan berisikan kegiatan pengumpulan dan analisis mengenai data dan informasi serta pelaporan mengenai tingkat perkembangan capaian hasil kegiatan pelaksanaan, ketepatan sistem dan proses pelaksanaan,

Hasil analisis data penelitian menunjukkan bahwa aspek pengevaluasian dilakukan oleh pemerintahan kampung dan bekerja sama dengan tim pendamping distrik, sedangkan untuk masyarakat sendiri kurang dilibatkan secara langsung dalam tahapan pengevaluasian, sehingga masyarakat sendiri ada yang tidak tau tentang pencapaian hasil dari suatu program yang sudah dilaksanakan di

Kampung Marga Mulia. Hal ini menunjukkan bahwa proses evaluasi melaksanakan program pembangunan yang ada di Kampung Marga Mulai hanya dilakukan oleh perangkat kampung tanpa melibatkan masyarakat secara langsung baik dari evaluasi proses pelaksanaan maupun evaluasi hasil dari sebuah pelaksanaan. Keterlibatan masyarakat secara langsung dalam kegiatan evaluasi baik pada proses maupun pada evaluasi hasil merupakan bagian yang sangat penting dalam mewujudkan transparansi informasi publik sebagai penjabaran dari tata kelola pemerintahan yang baik (*Good governance*). Evaluasi merupakan suatu proses dalam menyediakan informasi bagi masyarakat agar dapat mengetahui sejauh mana kegiatan tersebut telah mencapai hasilnya.

Evaluasi adalah suatu kegiatan sistematis dan terencana untuk mengukur, menilai dan klasifikasi pelaksanaan dan keberhasilan program. Partisipasi masyarakat dalam kegiatan pengevaluasian program merupakan langkah strategi dalam proses pembangunan yang dilakukan untuk: *a*). menyediakan pertanggungjawaban kegiatan kepada masyarakat, stakeholder, dan lembaga donor; *b*). membantu menentukan tujuan yang telah ditentukan pada perencanaan; *c*). meningkatkan program implementasi; *d*). memberikan kontribusi untuk pemahaman ilmiah tentang hasil suatu program; dan *e*). meningkatkan kesadaran dan dukungan terhadap masyarakat, dan *f*). menginformasikan kebijakan.

Tahapan evaluasi merupakan sebuah langkah manajemen strategi untuk mengetahui kendala-kendala yang terjadi dalam tahapan sebelumnya guna memperbaiki kinerja pembangunan ke depan agar jauh lebih baik. Hal ini senada dengan pendapat dari (**Suprihanto, 1988**), mengatakan bahwa tujuan evaluasi antara lain: *a*). sebagai alat untuk memperbaiki dan perencanaan program yang akan datang, *b*). untuk memperbaiki alokasi sumber dana, *c*). memperbaiki pelaksanaan dan faktor yang mempengaruhi pelaksanaan program perencanaan kembali melalui kegiatan pengecekan kembali relevansi program dan mengukur kemajuan target yang direncanakan.

## **E. KESIMPULAN**

Berdasarkan pada analisis data penelitian, maka dapat disimpulkan bahwa pendekatan *participatory rural appraisal* (PRA) di Kampung Marga Mulia Distrik

Semangga belum optimal dilakukan. Hal ini dapat terlihat bahwa masyarakat belum semuanya terlibat secara utuh dalam proses pembangunan. Keterlibatan masyarakat hanya pada saat perencanaan dan pelaksanaan pembangunan. Aspek pelaksanaan masih perlu diperkuat lagi dengan melibatkan masyarakat secara keseluruhan sebagai modal sosial dalam masyarakat yang dilandasi pada kegotongroyangan. Keterlibatan Masyarakat masih kurang pada tahapan pengawasan dan pengevaluasian sebagai perwujudan control sosial guna menciptakan iklim pembangunan yang partisipatif dan demokrasi. Keterlibatan masyarakat untuk pengevaluasian masih kurang optimal. Pengevaluasian hanya dilakukan oleh aparatur kampung yang mewakili masyarakat dan kurang mengkomunikasikan kembali kepada masyarakat selaku pemberi mandat sebagai wujud transparansi dan acauntabilitas sosial atas penyelenggaraan program pembangunan yang sudah dilaksanakan.

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan sebelumnya, maka dapat disampaikan beberapa saran sebagai berikut :

1. Perlu adanya sinergisitas antara masyarakat dan pemerintah kampung dalam proses pembangunan kampung dengan mengedepankan prinsip partisipatif dan demokrasi. Prinsip ini penting untuk dikedepankan dalam setiap aktivitas pembangunan kampung sebagai bentuk interpretasi dari model pembangunan *participatory rural appraisal* (PRA) berdasarkan basis kebutuhan masyarakat kampung, namun bukan ditentukan oleh pihak yang otoritatif.
2. Kemampuan masyarakat pada umumnya dan juga aparatur kampung pada khususnya dalam merubah paradigma pembangunan kampung perlu dipertingkatkan lagi, agar bisa menghasilkan program-program kerja pembangunan yang lebih inovatif dan berkesinambungan yang sesuai dengan tuntutan kebutuhan masyarakat.
3. Perlu dirumuskan standar baku pelaksanaan pembangunan yang jelas untuk dijadikan sebagai indikator pengukuran kinerja dari sebuah keberhasilan program pembangunan kampung, sehingga keberhasilan program pembangunan tidak hanya diukur dari dilaksanakannya program



tersebut, akan tetapi sejauh mana dampak akhir dari program pembangunan tersebut.

4. perlu adanya pemerataan program dari setiap bidang program pembangunan yang sudah disusun bersama dengan masyarakat kampung, sehingga tidak terkesan ada bidang program tertentu yang lebih dominan dari bidang-bidang program pembangunan yang lainnya karena keberhasilan pembangunan kampung merupakan totalitas dari keseluruhan bidang program pembangunan yang ada.

## REFERENSI

- Abe, Alexander, 2002, *Perencanaan Daerah Partisipatif*, Penerbit Pondok Edukasi, Solo.
- Chambers, Robert . 1996. *Shortcut Methods in Social Information Gathering for Rural Development Projects*”. *Proceedings of the 1985 International Conference on Rapid Rural Appraisal*. Khon Kaen University: Rural Systems Research and Farming Systems Research Project.
- Kartasasmita, Ginanjar. 1997. *Pemberdayaan Masyarakat: Konsep Pembangunan Yang Berakar Pada Masyarakat*. Surabaya.
- LAN RI, 2003. *Sistem Administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia, Buku I : Prinsip-prinsip Penyelenggaraan Negara*, LANRI, Jakarta.
- Midgley, James. 1986. *Community Participation, Social Development and The State*. London. Metheun.
- Mustopadidjaja, AR., 2003. *Manajemen Proses Kebijakan Publik*. Lembaga Administrasi Negara-Duta Pertiwi Foundation. Jakarta.
- Ndraha, Taliziduhu. 1990. *Pembangunan Masyarakat, Mempersiapkan Masyarakat Tinggal Landas*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Prijono, Onny S. dan Pranarka A.M.W. (ed.). 1996. *Pemberdayaan : Konsep, Kebijakan dan Implementasi*. Jakarta: Centre for Strategic and International Studies (CSIS).
- Rosidi dan Fajriani. 2013. *Reinventing Givernment, Demokrasi dan Reformasi Pelayanan Publik*. Andi Offset. Yogyakarta.
- Slamet, Y. 1994. *Pembangunan Masyarakat Berwawasan Partisipasi*. Surakarta: Sebelas Maret University Press.
- Suadi Arif, 1995, *Organisasi dan Management*. Jakarta.
- Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Alfabeta, Bandung.
- Sumaryadi, I Nyoman, 2005, *Perencanaan Pembangunan Daerah Otonom dan Pemberdayaan Masyarakat*. Jakarta: Penerbit Citra Utama.
- Suprihanto. 1988. *Manajemen Personalia*. Yogyakarta. BPFE.
- Usman, Sunyoto. 2003. *Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat*, Yogyakarta. Pustaka Pelajar.
- Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah